

ABSTRAK

Secara faktual, Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Adanya fakta bahwa Pasal 28 ayat (2) UU ITE cenderung digunakan untuk mengkriminalisasi orang-orang yang mengeluarkan pendapatnya berupa kritikan di media elektronik karena adanya ketidakjelasan makna dari konsep “antargolongan” dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE sehingga menyebabkan penafsiran yang berbeda-beda di kalangan aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum teoritikal (*theoretical research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Kesimpulan dari skripsi ini adalah pertimbangan hakim dalam beberapa putusan pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi tidak dapat memberikan makna yang jelas dari konsep “antargolongan”, bahkan Putusan Mahkamah Konstitusi pun cenderung memperluasnya. Dengan penafsiran sistematis, maka dalam menemukan kriteria dari konsep “antargolongan” dalam Pasal 28 ayat (2) dapat digunakan istilah “golongan” dalam Pasal 156 KUHP.

Kata Kunci : Konsep “Antargolongan”, Pasal 28 ayat (2) UU ITE, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

Factually, Article 28 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE) tends to be used to criminalize those who issue opinions in the form of criticism through electronic media because there is an unclear meaning of the concept of "intergroup" in Article 28 paragraph (2) of the ITE Law so it causes different interpretations among law enforcement officials. This thesis aims to find clear criteria regarding the concept of "intergroup" contained in Article 28 Paragraph (2) of the ITE Law. The research method used is theoretical research, using statute approach, conceptual approach, and case approach. The conclusion of this thesis is the consideration of judges in several court decisions, both the district court and the high court cannot give a clear meaning of the concept of "intergroup", even the Constitutional Court Decision also tends to expand it. With systematic interpretation, then in finding the criteria of the concept of "intergroup" In Article 28 paragraph (2) of the ITE Law may use the term "group" in Article 156 of the Criminal Code.

Keywords : *“Intergroup” Concept, Article 28 paragraph (2) ITE Law, Judge’s Consideration.*